

 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR BADAN KEUANGAN DAERAH BIDANG PERBENDAHARAAN	Nomor SOP	55 Tahun 2024
	Tanggal Pembuatan	Oktober 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, <i>H</i>
		 Drs. Benhard Menoh, MT Pembina Tingkat I NIP 19720512 199101 1 001
Judul SOP	Pemungutan Dan Pemotongan Fihak Ketiga (PFK)	
Dasar Hukum :		
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah daerah. 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212 /PMK.05/2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156 /PMK.05/2019 Tentang Dana Perhitungan Fihak Ketigaaturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik. 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Kualifikasi pelaksana : Memiliki Kemampuan bekerja tepat waktu dan teliti	
Keterkaitan :		
1. SOP penanganan surat keluar. 2. SOP penanganan surat masuk. 3. SOP Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	Peralatan/perlengkapan : 1. Komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Meja 4. ATK 5. Kursi 6. Dokumen SP2D	
Peringatan		
Apabila pengadministrasian pemungutan dan pemotongan pihak ketiga terlambat dibuat maka pelaporan pemungutan dan pemotongan pihak ketiga akan terlambat	Pencatatan dan pendataan : Harus dilakukan dengan teliti, akurat dan tepat waktu	

No.	Tahap Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Bidang	Kepala Sub Bidang	Penata Keuangan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Memerintahkan Kasubid untuk mencatat pemungutan dan pemotongan pihak ketiga	Mulai			Agenda Kerja	5 Menit	Agenda Kerja	
2.	Memerintahkan staf untuk mencatat pemungutan dan pemotongan pihak ketiga ke dalam kertas kerja				Agenda Kerja	10 Menit	Kertas kerja pemungutan dan pemotongan pihak ketiga	
3.	Menginput dan merekap pemungutan dan pemotongan pihak ketiga kedalam kertas kerja serta mengarsipkan semua bukti SSP dan bukti lainnya			Selesai	-SP2D -Kertas Kerja pemungutan dan pemotongan pihak ketiga -Rekapan pemungutan dan pemotongan pihak ketiga -SSP dan bukti pendukung lainnya -Bukti Bayar MPN	4 Jam	Laporan hasil Kertas Kerja pemungutan dan pemotongan pihak ketiga : -Taspen -Bulog -BPJS Kesehatan -BPJS Ketenagakerjaan -KPP Pratama -KPPN	